

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kas

Kas merupakan suatu unsur terpenting dalam neraca sebagai elemen dari aktiva lancar yang paling likuid bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kas membutuhkan penanganan yang serius bagi semua pihak yang ada dalam perusahaan. Istilah kas dalam pengertian sehari-hari dapat disamakan dengan uang kontan atau uang tunai yang dapat dijadikan alat pembayaran yang sah. Dalam arti sebenarnya kas mencakup hal yang lebih luas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah.
- b. Dapat digunakan setiap saat bila dibutuhkan.
- c. Penggunaannya bersifat bebas.
- d. Digunakan sesuai dengan nilai nominal pada waktu digunakan.

Kas menjadi begitu penting bagi perorangan, perusahaan bahkan pemerintah yang harus mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar aktivitas yang bersangkutan dapat terus berjalan. Pada setiap transaksi usaha, kas secara langsung atau tidak langsung terlibat didalam perusahaan. Penyajian kas dalam neraca lazimnya disajikan pada urutan pertama aktiva karena kas merupakan aktiva yang paling likuid (lancar). Kas merupakan unsur harta yang paling likuid dibanding dengan harta perusahaan lainnya dan memiliki sifat-sifat yang istimewa. Selain itu kas

merupakan harta perusahaan yang dalam penggunaannya dapat dilakukan setiap saat dan memerlukan pemeriksaan yang baik agar terhindar dari penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakefisienan dari penerapannya. Karakteristik umum suatu aset dikatakan sebagai kas adalah bahwa aset tersebut dapat diterima oleh bank sebagai setoran dengan jumlah yang sama dengan nominal yang tertera pada aset tersebut. Dengan demikian, yang termasuk dalam kategori kas adalah aset yang digunakan sebagai alat pembayaran atau media tukar ketika diperlukan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 (2012) bahwa:

Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*), sedangkan setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Sebagaimana di bawah ini pengertian kas yang dikemukakan oleh Soemarso (2010 : 296) menyatakan bahwa “Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nominalnya”. Adapun pengertian kas yang dikemukakan oleh Sukrisno Agus (2008 : 45) menyatakan bahwa:

Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat digunakan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat :

1. Setiap saat dapat ditukar menjadi uang.
2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat.
3. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat bunga.

Yang termasuk dalam klasifikasi kas adalah:

- a. Uang kartal.
- b. Uang giral.
- c. Cek yang diterima sebagai alat pembayaran oleh pihak lain (termasuk *traveller's cheque*).
- d. *Bank overdraft* (alat bayar antar bank karena ada rekening koran yang negatif).
- e. Wesel pos.

Yang tidak termasuk kas adalah:

- a. Deposito berjangka.
- b. Cek mundur.
- c. Uang yang digunakan untuk tujuan tertentu (misal dana pensiun).
- d. Perangko dan materai.

Menurut Munawir (2010 : 14) berpendapat bahwa : Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau permintaan deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh perusahaan.

Dalam pengertian di atas kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, agar suatu alat pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai kas yaitu :

1. Harus diterima oleh umum sebagai alat pembayaran atau di terima oleh bank sebagai simpanan, sebesar nilai nominalnya.
2. Harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan perusahaan sehari-hari.

Dari berbagai ragam yang dilakukan perusahaan, transaksi yang sering atau paling banyak adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran uang kas. Semua transaksi akhirnya akan menjadi uang tunai. Penjualan barang atau jasa dengan tunai akan menambah kas.

Adapun sifat-sifat uang (kas) menurut Munawir (2010 : 15) adalah sebagai berikut :

1. Dapat segera digunakan sebagai alat pembayaran
2. Kecil dan ringan, karena itu mudah dipindahkan
3. Mudah ditukarkan dengan barang lain
4. Nilai mata uang itu sendiri lebih tinggi dari pada bahan kertas atau logam yang digunakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan aktiva yang paling likuid dibanding dengan harta perusahaan lainnya dan memiliki sifat-sifat yang istimewa. Selain itu kas merupakan harta perusahaan yang dalam penggunaannya dapat dilakukan setiap saat dan memerlukan pemeriksaan yang baik agar terhindar dari penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakefisienan dari penerapannya.

2.2. Tujuan Pemeriksaan Kas

Menurut Sukrisno Agus (2008:87), pemeriksaan atas kas dan setara kas dilakukan untuk meyakinkan bahwa :

- a. Posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan (*existence and ownership*).
- b. Semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah (*completeness*).
- c. Kas di bank seperti yang dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar (*mathematical accuracy*).
- d. Kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar (*validity and valuation*).
- e. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat (*cut-off*).
- f. Kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar (*disclosure*).

Selain itu Sukrisno Agus (2008:87-88) juga menyebutkan tujuan audit kas, bank dan setara kas yaitu :

- a. Untuk memeriksa apakah terdapat *internal control* yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank.
- b. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan
- c. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas.

- d. Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan.
- e. Untuk memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas berdasarkan pendapat tersebut adalah :

- a. Untuk memeriksa apakah terdapat *internal control* yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank.

Beberapa ciri pemeriksaan kas adalah :

- 1) Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank.
 - 2) Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah oleh kepala bagian akuntansi
 - 3) Digunakannya *impress fund system* untuk mengelola kas kecil
 - 4) Penerimaan kas, cek & giro harus di setor ke bank dalam jumlah seutuhnya
 - 5) Uang kas disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan baik.
- b. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan, maksudnya pemeriksa harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki

perusahaan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Karena itu pemeriksa harus melakukan kas opname dan mengirim konfirmasi ke bank.

- c. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lain. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar.
- d. Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dari Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan.

Ciri pengendalian yang baik atas kas dan setara kas menurut Soemarso (2010 : 109) yaitu :

- a. Adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank.
- b. Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah oleh kepala bagian akuntansi.
- c. Digunakannya *impress fund system* untuk mengelola kas kecil.
- d. Penerimaan kas, cek & giro harus di setor ke bank dalam jumlah seutuhnya
- e. Uang kas disimpan di tempat yang aman misalnya di brankas.
- f. Uang kas harus dikelola dengan baik yaitu jangan terjadi kas yang menganggur.
- g. Giro harus ditempatkan pada tempat yang aman supaya tidak disalahgunakan.

- h. Giro sebaiknya ditandatangani oleh minimal oleh 2 orang supaya ada kontrol dan tidak disalahgunakan.
- i. Kuitansi bernomor urut.
- j. Bukti pendukung dari pengeluaran kas yang sudah dibayar distempel lunas supaya tidak terjadi double pembayaran.

Selain itu menurut Mulyadi (2009:89) bahwa “Pemeriksaan kas dalam penerapannya di perusahaan didukung dengan struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dan praktek yang sehat”. Mulyadi (2009:102) juga menjelaskan bahwa “Pemakaian dokumen yang lengkap juga merupakan alat bantu dalam pengendalian kas yang berupa formulir dan dokumen, buku harian (jurnal) dan buku besar dan buku pembantu”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan kas diantaranya adalah untuk memeriksa apakah terdapat kontrol yang baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas serta untuk memastikan apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan.

2.3. Prosedur Pemeriksaan Kas

Prosedur pemeriksaan kas, bank dan setara kas menurut Sukrisno Agus (2008 : 89) yaitu :

- a. Pahami dan evaluasi pengendalian internal atas kas dan setara kas.
- b. Membuat *Top Schedule* kas dan setara kas per tanggal neraca.
- c. Melakukan perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca.
- d. Lakukan konfirmasi atau dapat juga dengan dengan pernyataan saldo dari kasir apabila tidak dilakukan perhitungan fisik.
- e. Meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca dan lakukan pemeriksaan.
- f. Review jawaban konfirmasi bank, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan.
- g. Periksa transaksi interbank kira-kira 1 (satu) minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca.

- h. Periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca untuk mengetahui *subsequent payment* dan *subsequent collection* sampai tanggal selesainya pemeriksaan.
- i. Periksa apakah perusahaan jika menggunakan mata uang asing sudah dikurskan dengan menggunakan kurs tengah BI dan telah di catat di laba-rugi tahun berjalan.
- j. Cek apakah penyajiannya telah sesuai prinsip akuntansi berlaku umum.
- k. Terakhir simpulkan di *top schedule* atau di memo tersendiri mengenai kewajaran kas dan setara kas setelah melakukan prosedur di atas.

Dalam melakukan pemeriksaan kas menurut Mulyadi (2009:87) ada beberapa prosedur dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Siapkan skedul utama dari kas dan setara kas.
- b. Lakukan perhitungan kas (*cash count*) secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- c. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan.
- d. Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas.
- e. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur (*trace back*) ke tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca lakukan penarikan maju (*trace forward*) ke tanggal neraca.
- f. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca.
- g. Periksa penjumlahan (*footing* atau *cross footing*) lembaran-lembaran buku kas, perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya.
- h. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap (*Imprest fund*), teliti apakah sudah ada petanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali.
- i. Pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca.
- j. Buat daftar koreksi yang diperlukan
- k. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para *partner* serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu pemeriksaan.

Berdasarkan pelaksanaan kerjanya, menurut Mulyadi (2009:89) bahwa “Prosedur pemeriksaan dapat dibagi atas prosedur awal, prosedur analitik,

pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci dan verifikasi penyajian kas di neraca”.

Berikut penjelasannya.

a. Prosedur Awal

- 1) Usut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang ada.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo kas yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo kas yang dicantumkan di neraca di usut ke akun buku besar berikut ini:

- Kas yang merupakan rekening giro di bank.
- Kas dalam perjalanan yang merupakan penerimaan kas yang pada tanggal pembuatan laporan keuangan belum disetor ke bank.
- Dana kas kecil yang berupa sisa uang tunai yang berada di tangan pemegang dana kas kecil.

- 2) Hitung kembali saldo akun kas di buku besar.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian penghitungan saldo akun kas, pemeriksa menghitung kembali saldo akun tersebut, dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah penarikan dan mengurangnya dengan jumlah pengkreditan akun tersebut.

- 3) Usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu.

Sebelum pemeriksa melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun kas, pemeriksa memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal akun tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, pemeriksa melakukan

pengusutan saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan tahun lalu, sehingga pemeriksa dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan pemeriksa.

- 4) Lakukan *review* terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas.

Ketidak-beresan dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dapat ditemukan melalui *review* atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun kas.

- 5) Usut *posting* pendebitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang bersangkutan.

Pendebitan di dalam akun kas diusut ke jurnal penerimaan kas dan kredit akun tersebut di usut ke jurnal pengeluaran kas untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan kas berasal dari jurnal.

b. Prosedur Analitik

Pada tahap awal pengujian substantif terhadap kas, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu pemeriksa dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan pemeriksaan lebih intensif. Disamping itu, pemeriksa perlu membandingkan saldo akun kas yang tercantum di neraca dengan saldo kas pada akhir tahun yang lalu. Perbandingan ini membantu pemeriksa untuk mengungkapkan;

- 1) Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa.
- 2) Perubahan kondisi keuangan.
- 3) Perubahan usaha.
- 4) Fluktuasi acak.
- 5) Salah saji.

c. Pengujian Terhadap Transaksi Rinci

- 1) Verifikasi pisah batas (*cut off*)

Dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang termasuk dalam tahun yang diperiksa dibanding tahun sebelumnya.

- 2) Buatlah daftar transfer bank dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menemukan kemungkinan terjadinya kemungkinan *Check Kitting*.

Check kitting dilakukan untuk menutupi pemakaian kas perusahaan dengan cara melakukan transfer rekening dari bank ke rekening bank yang dananya digelapkan pada saat bank-bank menyiapkan pembuatan rekening koran bank. Pengertian *kitting* yang dikemukakan oleh Arrens (2008 : 396) bahwa: “*Kitting* adalah transfer uang dari satu bank ke bank lainnya tetapi pencatatannya tidak benar sehingga dana dicatat sebagai aktiva pada kedua akun; praktik ini digunakan oleh penggelap uang untuk menutupi pencurian kas”.

Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki rekening giro di Bank BNI dan di Bank Niaga, dan pejabat perusahaan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan uang yang ada di Bank BNI. Untuk menutupi kecurangannya, pejabat perusahaan tersebut membuat cek untuk mengeluarkan uang dari bank Niaga dan ditransfer ke rekening giro bank BNI. Dengan demikian rekening koran dari kedua bank tersebut menunjukkan saldo kas di bank seolah-olah tidak terjadi pemakaian oleh pejabat tersebut.

- 3) Buatlah dan lakukan analisis terhadap rekonsiliasi bank empat kolom.

Rekonsiliasi bank empat kolom digunakan oleh pemeriksa untuk membuktikan kebenaran saldo kas di bank.

Contoh dari rekonsiliasi bank empat kolom sebagai berikut:

PT XXX				
Pembuktian Ketelitian Saldo Kas				
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Kas menurut rekening koran				
Setoran dalam perjalanan				
Cek yang beredar				
Cek kosong				
Saldo bank setelah di- <i>adjust</i>				

Sumber; Mulyadi (2009 : 87)

- 4) Periksa adanya kemungkinan penggelapan kas dengan cara *lapping* penerimaan dan pengeluaran kas.

Lapping dapat terjadi jika penyimpanan kas merangkap fungsi sebagai pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. *Lapping* dilakukan oleh karyawan tersebut dengan cara tidak mencatat penerimaan kas dari debitur tertentu dan memasukan uang yang diterima tersebut ke dalam sakunya sendiri. Untuk menutupi kecurangannya dengan mengkredit akun piutang kepada debitur lain digunakan untuk menutupi kecurangannya dengan mengkredit akun piutang kepada debitur pertama.

d. Pengujian terhadap akun rinci.

Keberadaan kas yang dicantumkan di neraca dibuktikan dengan menghitung kas yang ada ditangan klien pada tanggal neraca dan untuk kas klien yang disimpan di bank dengan cara memeriksa rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien pada tanggal neraca dan mengirim surat konfirmasi bank.

- 1) Hitung kas yang ada ditangan klien.
- 2) Rekonsiliasi catatan kas dengan catatan rekening koran bank yang bersangkutan.
- 3) Lakukan konfirmasi saldo kas di bank.
- 4) Periksa cek yang beredar pada tanggal neraca ke dalam rekening koran bank. Untuk membuktikan penyelesaian cek yang beredar pada tanggal neraca, pemeriksa mengusut penguangan cek tersebut ke dalam rekening koran bank yang diterima klien.

e. Verifikasi penyajian kas di Neraca.

- 1) Periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu klien di bank.

Seperti tersebut dalam prinsip penyajian kas di neraca, kas yang disimpan di bank hanya dapat disajikan sebagai unsur kas jika tidak terdapat batasan penggunaannya dari bank atau batasan yang dikenakan oleh kontrak perjanjian tertentu. Dari jawaban konfirmasi bank dapat diketahui batasan-batasan, jika ada yang dikenakan oleh bank atas penggunaan rekening-rekening bank klien.

- 2) Lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan penggunaan kas klien.

Informasi mengenai batasan atas penggunaan berbagai dan kas yang dibentuk oleh klien dapat diperoleh dari wawancara dengan manajer keuangan. Informasi ini akan menentukan apakah suatu unsur disajikan dalam kasus atau harus dipisahkan tersendiri khusus kelompok aktiva lancar, atau bahkan harus disajikan terpisah pada kelompok aktiva tidak lancar.

Sementara menurut Mulyadi (2009:105), prosedur audit yang dilakukan auditor untuk kas dan setara kas meliputi sebagai berikut :

1. Lakukan perhitungan kas (*Cash Count*).
2. Bila perhitungan dilakukan sebelum tanggal neraca maka buatlah perhitungan tarik maju kas, dan bila perhitungan dilakukan setelah tanggal neraca maka buatlah perhitungan tarik mundur kas.
3. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas seminggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. (Bila menggunakan metode fluktuasi).
4. Konfirmasi kas di Bank.
5. Periksa rekening koran dan cocokkan dengan hasil konfirmasi bank.
6. Minta rekonsiliasi Bank (jika ada) yang telah disetujui oleh yang berwenang per tanggal Laporan keuangan dan periksa kebenarannya.
7. Review jawaban Rekonsiliasi Bank, Notulen rapat dan dokumen lainnya untuk mengetahui adanya pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas.

8. Periksa pengeluaran bank seminggu sebelum dan sesudah tanggal Laporan Keuangan.
9. Konfirmasi Deposito Berjangka di Bank.
10. Periksa Sertifikat Deposito dan sesuaikan dengan hasil konfirmasi bank.
11. Periksa penerimaan bunga deposito.
12. Periksa Kas setara kas dalam valas apakah telah di konversi kan dengan kurs yang tepat dan pengaruhnya telah dibukukan.

Menurut Hartadi dan Djamaluddin (2010:154), adapun alat bantu yang digunakan dalam prosedur audit yang dilakukan auditor untuk kas dan setara kas adalah :

1. Kertas Kerja Pemeriksaan.
2. Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. Sistem Pengendalian Intern.
4. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen.

Berikut penjelasannya.

1. Kertas Kerja Pemeriksaan.

Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga.

2. Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur audit yang dilakukannya, tes yang diadakan, informasi yang didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisa, memorandum, surat konfirmasi dan representasi, ikhtisar dokumen perusahaan, rincian pos neraca dan laba rugi serta komentar yang dibuat atau diperoleh oleh auditor mempunyai beberapa tujuan:

- a. mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja di perusahaan.
- b. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP). Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Akuntan Publik sudah diikuti dengan baik oleh auditor.
- c. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank dan pihak klien.
- d. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan *partner* sesudah selesai suatu penugasan.
- e. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staf yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, untuk mengetahui masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan *audit plan* tahun berikutnya.

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Standar pengerjaan lapangan yang kedua menyebutkan: pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. IAI mendefinisikan SPI sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan persolnel lain entitas yang didisain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen:

- a. Lingkungan pengendalian. Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian mencakup: integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktek sumber daya manusia (SDM).
- b. Penaksiran resiko. Identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut : perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk, produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri dan standar akuntansi baru.
- c. Aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

Umumnya aktivitas pengendalian berkaitan dengan: *Review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

- d. Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:
- 1) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi Laporan Keuangan.
 - 2) Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
 - 3) Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam Laporan Keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
 - 4) Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.
- e. Pemantauan. Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan menggunakan berbagai kombinasi dari keduanya.

2.4. Bentuk Penyimpangan Kas

Kas merupakan aset yang paling banyak diselewengkan karena bentuknya yang mudah untuk dipergunakan atau dibawa.

Menurut Leo Juliawan (2011 : 2) menyebutkan beberapa bentuk penyelewengan atau penyimpangan kas yaitu :

1. Tidak melaporkan atau mencatat penerimaan kas.
2. Menggunakan bukti palsu untuk pembayaran kas.
3. Sengaja melakukan kesalahan dalam pemeriksaan tagihan dan pembayaran.
4. Sengaja melakukan kesalahan penghitungan saldo kas.

Berikut ini penjelasannya.

1. Tidak melaporkan atau mencatat penerimaan kas.

Kasir secara sengaja mencuri uang kas dengan tidak melaporkan adanya penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, pembayaran piutang dari pelanggan, penjualan barang-barang lainnya atau penerimaan yang berasal dari pengembalian biaya, ganti rugi atau klaim asuransi dan lain sebagainya.

2. Menggunakan bukti palsu untuk pembayaran kas.

Kasir bekerja sama dengan pemasok yang menerbitkan faktur palsu untuk melakukan pembayaran fiktif. Hal ini terjadi jika sistem pembelian dan verifikasi pembayaran yang lemah, dimana tidak ada kontrol pembayaran dengan pembelian dan penerimaan barang.

3. Sengaja melakukan kesalahan pemeriksaan tagihan dan pembayaran.

Secara sengaja kasir melakukan kesalahan penghitungan nilai total tagihan yang dibayar. Ini terjadi ketika jumlah faktur yang dibayar cukup banyak dan tidak dilakukan penghitungan ulang.

4. Sengaja melakukan kesalahan penghitungan saldo kas.

Modusnya sama dengan penyelewengan di atas, namun objek kesalahan hitung adalah buku kas. Seolah-olah terjadi kesalahan jumlah, namun sebenarnya kasir secara sengaja salah menghitung sehingga jumlah pembayaran kas menjadi lebih besar atau jumlah penerimaan kas menjadi lebih kecil sehingga saldo kas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan saldo tunainya, jadi selisih saldo itulah yang dicuri.

Dengan demikian terdapat beberapa bentuk penyelewengan atau penyimpangan kas meliputi tidak melaporkan atau mencatat penerimaan kas, menggunakan bukti palsu untuk pembayaran kas, sengaja melakukan kesalahan pemeriksaan tagihan dan pembayaran dan sengaja melakukan kesalahan penghitungan saldo kas.

2.5. Antisipasi Penyimpangan Kas

Penyimpangan kas merupakan kejahatan dalam perusahaan yang sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan kas merupakan harta perusahaan yang dalam penggunaannya dapat dilakukan setiap saat, sehingga memerlukan pengawasan yang baik agar terhindar dari penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakefisienan dari penerapannya, maka alat yang tepat untuk pengawasannya yaitu dengan upaya antisipasi penyimpangan terhadap kas.

Antisipasi penyimpangan terhadap kas dapat dilakukan dengan menerapkan pengawasan kas yang ketat. Hartadi dan Djamaluddin (2010 : 43) bahwa "Pengawasan kas merupakan suatu metode pengujian validitas pencatatan transaksi kas, sehatnya metode yang digunakan dalam pencatatan kas dan penanganannya serta keakuratan pencatatan keuangannya".

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kas mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya menjaga keamanan kas perusahaan. Tanpa suatu pengawasan kas yang baik, suatu perusahaan tidak akan dapat mengawasi jalannya operasi dan pengalaman membuktikan bahwa pengawasan yang baik merupakan suatu langkah yang dapat mengarahkan seluruh aktivitas dan menjaga keamanan harta perusahaan.

Selanjutnya menurut Zaki Baridwan (2010 : 87), terdapat beberapa prosedur pengawasan kas yang dapat digunakan yaitu :

1. Prosedur penerimaan uang terdiri dari :
 - a. Harus ditunjuk dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank.
 - b. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas.
 - c. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas.
2. Prosedur pengeluaran uang terdiri dari :
 - a. Semua pengeluaran uang yang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dengan kas kecil.
 - b. Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat
 - c. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem *voucher*.
 - d. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas.

- e. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu.
- f. Diharuskan membuat laporan kas harian.

Pengawasan kas yang baik sebagai antisipasi penyimpangan kas biasanya mensyaratkan agar kas yang diterima, disimpan disetorkan secara langsung oleh pejabat keuangan atau kasir, sementara pencatatan yang berkaitan dengan setoran ke bank dilaksanakan secara langsung oleh bagian keuangan. Untuk mengurangi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penyimpangan kas yang disengaja ataupun yang tidak disengaja terhadap harta kekayaan perusahaan inilah yang menjadi tugas utama bagi pengawasan kas sehingga penyimpangan kas dapat diketahui secara dini.

Pengawasan kas dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya pengawasan kas menurut Hartadi dan Djamaluddin (2010 : 44) adalah :

- 1) Mempelajari dan mengevaluasi sistem pengawasan intern terhadap transaksi kas.
- 2) Menentukan bahwa posisi kas secara wajar disajikan dalam Laporan Keuangan.

Penerapan pengawasan kas atau transaksi lainnya tetap memiliki keterbatasan. Sukrisno Agus (2008: 87) menyebutkan bahwa:

Terlepas dari bagaimana bagus desain dan operasinya, pengawasan kas hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengawasan entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengawasan kas.

Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengawasan kas dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengawasan kas dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih dikarenakan manajemen mengesampingkan pengawasan kas. Faktor lain yang membatasi pengawasan kas adalah biaya pengawasan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengawasan kas tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengawasan kas, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut.

Keterbatasan kedua yaitu bahwa pengawasan kas tidak dapat mencakup semua transaksi. Juga harus diakui bahwa pengawasan kas berada pada lingkungan usaha yang dinamis bukannya statis, perubahan kondisi seperti berhentinya eksekutif atau personalia penting atau digunakannya komputer akan mempengaruhi dan memerlukan modifikasi terhadap struktur pengawasan kas yang ada. Dengan demikian tujuan dilakukannya pengawasan kas adalah sebagai antisipasi terjadinya penyimpangan kas. Pengawasan kas dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengawasan kas dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih dikarenakan manajemen mengesampingkan pengawasan kas.

2.6. Pencegahan Penyimpangan

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan penyimpangan adalah berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

Menurut Amrizal (2017:4) bahwa pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Untuk hal tersebut, menurut Amrizal (2017: 5) kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Berdasarkan pendapat di atas berikut akan disajikan pembagian kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah secara satu persatu.

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.

Pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup :
 - 1) Integritas dan nilai etika
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi
 - 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
 - 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - 5) Struktur organisasi
 - 6) Pemberian wewenang dan tanggungjawab
 - 7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personel baru
- 3) Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
- 4) Teknologi baru
- 5) Lini produk, produk atau aktivitas baru
- 6) Operasi luar negeri
- 7) Standar akuntansi baru

c. Standar Pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan:

- 1) Penelaahan terhadap kinerja
- 2) Pengolahan informasi
- 3) Pengendalian fisik
- 4) Pemisahan tugas

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah,

meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

- e. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

a. Review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

b. Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum

biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

3. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar dalam meningkatkan kultur organisasi yaitu:

a. Keadilan (*Fairness*)

Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku

b. Transparansi

Keterbukaan (*Disclosure*) bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan yang dibuat dan kinerja yang telah dicapai.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada.

e. Moralitas

Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

f. Keandalan (*Reliability*)

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan

g. Komitmen

Pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya (*value of royalty*) serta menurunkan risiko perusahaan.

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa.

2.7. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sehubungan dengan penerapan pemeriksaan kas dalam upaya antisipasi penyimpangan kas akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Febrianti, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa, 2015	Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Peningkatan Efektivitas Pengendalian Intern Pada Aktiva Tetap PT. Socfindo Medan	Sistem informasi akuntansi telah digunakan dalam peningkatan efektivitas pengendalian intern pada aktiva tetap PT. Socfindo Medan	Penelitian sama-sama menganalisis penerapan informasi akuntansi kas perusahaan	Penelitian ini meneliti tentang pemeriksaan kas dan penelitian sebelumnya meneliti tentang sistem informasi kas
2.	Sri Kartini, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa, 2011	Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Erha Clinic Pusaka Cabang Medan.	Penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Erha Clinic Pusaka Cabang Medan sudah memadai.	Penelitian sama-sama menganalisis penerapan akuntansi kas perusahaan	Penelitian ini meneliti tentang pemeriksaan kas dan penelitian sebelumnya meneliti tentang sistem akuntansi kas
3.	Paskah M. Sihombing, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa, 2014	Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. BPR Sumber Tiopan Raya Tanjung Morawa.	Penerapan pengendalian intern sangat berperan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. BPR Sumber Tiopan Raya Tanjung Morawa	Penelitian sama-sama menganalisis penerapan pengendalian intern kas perusahaan	Penelitian ini meneliti tentang pemeriksaan kas dan penelitian sebelumnya meneliti tentang sistem pengendalian intern kas

2.8. Kerangka Konseptual

Kas dapat terhindar dari penyelewengan, penipuan serta penyimpangan maka diperlukan suatu pengawasan kas yang baik terhadap aktiva lancar tersebut. Salah satu tujuan pengawasan yang dapat dilakukan terhadap kas adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap kas. Pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis dibayar dengan cek, harus dibayar dengan uang tunai. Pembayaran dengan uang tunai dapat dilakukan jika dalam perusahaan dibentuk dana kas kecil (*petty cash*). Agar dana ini dapat diawasi dengan baik maka pengelolaannya sebaiknya menggunakan sistem dana tetap (*imprest fund method*).

Pengawasan atau kas perusahaan sebagai antisipasi penyimpangan kas, biasanya dilakukan dengan adanya pemisahan antara fungsi pengelolaan kas dan fungsi pencatatan kas. Prinsip yang paling fundamental dalam pengawasan kas adalah adanya tanggung jawab yang ditetapkan secara khusus terhadap seseorang. Jika lebih dari satu orang yang harus campur tangan dalam dana kas yang sama maka pada saat peralihan tanggung jawab harus dibuat suatu rekonsiliasi kas yang ada didalam perusahaan. Pengawasan kas yang baik pada akhirnya akan memberikan dampak kelancaran pada transaksi lainnya yang ada di perusahaan. Dengan adanya antisipasi penyimpangan terhadap kas berarti perusahaan sudah mampu menjaga serta mengelola kas dengan efektif. Keterkaitan antara penerapan pemeriksaan kas dalam upaya antisipasi penyimpangan kas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2-1
Kerangka Konseptual

